

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejarah perkembangan akuntansi yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi industri menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal (kaum kapitalis) sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan keberpihakan perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Kapitalisme, yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial (Galtung & Ikeda, 1995; Rich, 1996; Chwastiak, 1999, dalam Anggraini, 2006).

Di dalam akuntansi konvensional (*mainstream accounting*), pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab

sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Akan tetapi perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal* yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik.

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai *Social Responsibility Accounting (SRA)* atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.

Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan

biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut.

Berbagai penelitian yang terkait pengungkapan informasi sosial telah banyak dilakukan di berbagai negara seperti Belkaoui & Karpik (1989) dan Roberts (1992) melakukan penelitian di Amerika Serikat, Gray *et al.* (1995) di Inggris, Adams (2002) di Inggris dan Jerman, Ng (1985) dan Hackston & Milne (1996) di Selandia Baru. Beberapa determinan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan yang telah ditemukan penelitian sebelumnya adalah kinerja sosial, profitabilitas, *leverage*, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, penjualan, intensitas modal, umur perusahaan, jenis industri, *return* saham, kapitalisasi pasar, dan risiko pasar sistematis saham perusahaan.

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckling, 1976, dalam Anggraini, 2006). Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, *et al.* 1988, dalam Anggraini, 2006). Semakin besar kepemilikan manajerial didalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Hal ini mendukung teori keagenan, yaitu bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen dalam perusahaan, manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan *image*

perusahaan. Hubungan kepemilikan manajerial dengan pengungkapan sosial

dilakukan oleh Jensen and Mecling (1976), Gray, *et al.* (1988) dalam Anggraini (2006) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dari kedua variabel tersebut.

Perusahaan yang termasuk dalam tipe industri *high-profile* menurut Robert (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) adalah perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, tingkat resiko politik yang tinggi atau tingkat kompensasi yang ketat. Perusahaan *low profile* adalah perusahaan yang tidak terlalu memperoleh sorotan luas dari masyarakat manakala operasi yang mereka lakukan mengalami kegagalan atau kesalahan pada aspek tertentu dalam proses atau hasil produksinya. Dalam hubungan tipe industri dengan pengungkapan informasi sosial perusahaan terjadi ketidak konsistenan hasil Hackston dan Milne (1996), Anggraini (2006) menemukan hubungan positif dari kedua variabel tersebut. Demikian juga Paten (1991) dan Roberts (1992) seperti yang dinyatakan dalam Hackston dan Milne (1996). Sedangkan penelitian yang dilakukan Kelly, 1981; Davey, 1982; Ng, 1985; Cowen *et al.* 1987, dalam Sembiring (2005), tidak menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Gray *et al.* (2001) dalam Sembiring (2005) menemukan bahwa hubungan ini secara khusus terdapat pada industri minyak.

Perusahaan dalam memperoleh dana tidak hanya mengandalkan modal sendiri tetapi juga mendapatkannya dari utang jangka panjang (*leverage*) yang diperolehnya dari pihak kreditur. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi tidak fleksibel, sehingga perusahaan yang mempunyai utang yang cukup tinggi cenderung sedikit mengungkapkan informasi sosialnya. Hal tersebut disebabkan perusahaan tidak mempunyai cukup

dana untuk membiayai aktivitas sosialnya, karena sebagian dana/kas yang masuk dipergunakan untuk memenuhi kewajibannya. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial (Belkaoui dan Karpik, 1989; Surtanto, 1999; Sembiring, 2003). Penelitian Sembiring (2005) dan Anggraini (2006) menemukan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial.

Dalam hubungan antara risiko sistematis dengan pengungkapan informasi perusahaan dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989). Hasil penelitian ini menunjukkan terlihat pada kecenderungan manajemen untuk memilih prosedur akuntansi untuk mengurangi pengungkapan laba dan biaya politis. Terdapat asumsi di mana perusahaan besar akan lebih peka daripada perusahaan kecil dan fase yang berbeda dalam memilih prosedur akuntansi untuk melakukan manajemen laba sekarang lebih rendah daripada laba masa depan.

Dalam hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan informasi sosial, size perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variansi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, yaitu perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kelly, 1981; Trotman dan Bradley

,1981; Pang; 1982, Adams *et al.* 1998 dan Gray *et al.* 2001, dalam Sembiring, 2005), Belkaoui dan Karpik (1989), (Patten, 1991, 1992; dalam Hackston dan Milne 1996), menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan informasi sosial. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ng (1985) dalam Sembiring (2005) terhadap beberapa perusahaan di Selandia Baru tahun 1981 – 1983, menyimpulkan tidak terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan sosial oleh perusahaan.

Hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan informasi perusahaan yang dilakukan oleh Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beasley (2000) dan Arifin (2002) dalam Sembiring (2005). Penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2006) tidak berhasil menemukan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dengan judul **"Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Laporan Keuangan Tahunan"**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Anggainsi (2006). Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Anggainsi. Perbedaan utama dalam penelitian ini peneliti

menambah beberapa variabel, yaitu risiko sistematis pasar, dan ukuran dewan komisaris.

B. BATASAN MASALAH PENELITIAN

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan, yaitu:

1. Persentase kepemilikan manajerial.
2. Biaya politis perusahaan, meliputi tipe industri, *leverage*, risiko sistematis, dan ukuran perusahaan.
3. Ukuran dewan komisaris.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.
2. Apakah tipe industri berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.
3. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.
4. Apakah risiko sistematis pasar berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.
6. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.

D. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.
2. Pengaruh biaya politis terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.
3. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan.

E. Manfaat penelitian

Manfaat di bidang teoritis sebagai berikut:

1. Menambah bukti empiris tentang pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam laporan keuangan tahunan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya sebagai bahan pertimbangan dalam menambah referensi.

Manfaat di bidang praktis sebagai berikut:

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman pada perusahaan-perusahaan pentingnya pengungkapan informasi social sehingga perusahaan tidak hanya memperhatikan kepentingan finansialnya